

**ANALISIS INOVASI PELAYANAN AKTA KEMATIAN
MELALUI SISTEM INFORMASI PELAPORAN KEMATIAN
ONLINE (STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCACATAN SIPIL KABUPATEN BANGKA)**

Hattami Amar^{1*}, Anthony Lee Mega Satria²
^{1,2} Institut Pahlawan 12, Sungailiat, Indonesia

*Korespondensi: hattamiamar31@gmail.com

ABSTRAK

Pentingnya e-government dalam transformasi pelayanan publik seperti administrasi kematian tidak dapat dipandang sebelah mata, karena ia menjadi fondasi bagi modernisasi birokrasi di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana inovasi pelayanan akta kematian melalui Sistem Informasi Pelaporan Kematian online (SI POKEMON) pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bangka. Metode penelitian menggunakan model kombinasi Concurrent Embedded Strategy. Pendekatan kualitatif dianalisis menggunakan model Rogers dan model Borins dan Drucker, sedangkan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan SI POKEMON sangat menguntungkan bagi masyarakat maupun pihak pelaksana. Inovasi ini sesuai dengan nilai dan norma masyarakat, maupun kebijakan pusat dan daerah, pelaksanaannya tidak begitu rumit, bisa dilakukan uji coba dan diamati cara kerja dan hasilnya dan hambatan yang terjadi tidak begitu signifikan. Inovasi SI POKEMON berdampak positif terhadap peningkatan yang signifikan penerbitan akta kematian. Kesimpulannya adalah bahwa inovasi ini telah berhasil mengubah perilaku masyarakat dari pasif menjadi proaktif. Sehingga jumlah pelaporan kematian maupun akta kematian yang tercetak mengalami peningkatan yang signifikan selama enam tahun terakhir 2020 – 2025. Untuk pengembangan lebih lanjut, stabilitas jaringan dan peralatan komputer/laptop di Desa/Kelurahan dan petugas pendampingan yang standby di Desa/Kelurahan.

Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan, SI POKEMON, Akta Kematian

ABSTRACT

The importance of e-government in the transformation of public services, such as death administration, cannot be underestimated, as it serves as the foundation for bureaucratic modernization in the digital era. This research aims to determine how the innovation of death certificate services functions through the Online Death Reporting Information System (SI POKEMON) at the Department of Population and Civil Registry of Bangka Regency. The research method employs a Concurrent Embedded Strategy mixed-methods model. The qualitative approach was analyzed using Rogers' model and the Borins and Drucker model, while the quantitative approach utilized descriptive analysis. The results indicate that the existence of SI POKEMON is highly beneficial for both the community and the implementing authorities. This innovation aligns with community values and norms, as well as central and local government policies. Its implementation is not overly

complex, allows for trial testing, and its processes and results are easily observable. Furthermore, the obstacles encountered are not significant. The SI POKEMON innovation has had a positive impact on the significant increase in death certificate issuance. In conclusion, this innovation has successfully shifted community behavior from passive to proactive, resulting in a significant increase in death reports and printed death certificates over the last six years (2020–2025). For further development, it is recommended to improve network stability, upgrade computer/laptop equipment in villages/sub-districts, and ensure assistance officers are standby at the local level

Keywords: Innovation, Service, SI POKEMON, Death Certificate

A. PENDAHULUAN

United Nations, (2021) dalam laporan tentang e-government development index, menyatakan bahwa pentingnya e-government dalam transformasi pelayanan publik seperti administrasi kematian tidak dapat dipandang sebelah mata, karena ia menjadi fondasi bagi modernisasi birokrasi di era digital. Secara teoritis, e-government memfasilitasi prinsip good governance dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. E-government berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) terkait kesehatan yang baik dan institusi yang kuat, dengan potensi mengurangi disparitas sosial di daerah terpencil.

Di Negara berkembang akibat menggunakan sistem manual sering mengalami underreporting kematian hingga 20-30% menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2022), sehingga berdampak pada kebijakan kesehatan publik. Kebijakan kesehatan publik seperti vaksinasi massal atau pengendalian epidemi (misalnya, polio atau Covid-19), membutuhkan data real-time. Keterlambatan dapat menghambat intervensi cepat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, dan mengurangi efektivitas program kesehatan publik

(WHO, 2022). Di Indonesia, di mana tantangan geografis seperti kepulauan dan kesenjangan infrastruktur sering menghambat akses layanan, dengan hadirnya e-government tidak saja akan mengurangi biaya operasional hingga 30-50%, namun tak kalah pentingnya adalah akan mempercepat respons terhadap kebutuhan publik (Sadar, 2023).

E-government tidak hanya mengatasi underreporting, tetapi juga mendukung integrasi data lintas instansi, seperti dengan DPKAD untuk santunan, sehingga mencegah kesalahan manusia dan korupsi. Namun, transisi dari sistem manual ke digital tidaklah mudah, terutama di daerah seperti Kabupaten Bangka, yang memiliki geografi kepulauan dan keterbatasan SDM. Pandemi Covid-19 mempercepat kebutuhan ini, dengan peningkatan akses online yang kompleks (Tunggul Prasodjo, 2023).

Menurut Ruslam Ahmadi (2024) perlunya e-government diterapkan pada lembaga pemerintah dan swasta yang bergerak di bidang pelayanan publik pada saat ini dalam rangka meredam anggapan publik bahwa birokrasi pelayanan publik sering kali dianggap sebagai institusi yang mempersulit. Ungkapan populer "Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah, kalau bisa diperlama kenapa dipercepat, kalau bisa diper mahal kenapa dipermurah".

Sejalan dengan era Industri 4.0, yang menuntut adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi.

Di Indonesia, undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan pentingnya akta kematian sebagai dokumen wajib, namun implementasinya sering terkendala oleh keterbatasan infrastruktur di daerah pedesaan. Akta kematian bukan hanya dokumen pribadi, tetapi juga data vital untuk perencanaan regional dan nasional, seperti deteksi tren kematian, alokasi anggaran kesehatan, dan program sosial. Fakta menunjukkan bahwa akibat sistem manual, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, angka kematian di Indonesia mencapai sekitar 700.000 jiwa per tahun, namun hanya sekitar 80-90% yang tercatat dalam akta kematian resmi (BPS, 2023).

Akibat underreporting dan data kematian yang tidak akurat akan berdampak terhadap kebijakan kesehatan publik, seperti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau kampanye anti-stunting bergantung pada data akurat untuk mengalokasikan anggaran dan sumber daya. Data yang kurang lengkap dapat menyebabkan kesalahan dalam deteksi tren kematian (misalnya, akibat penyakit menular atau kronis), sehingga kebijakan kesehatan tidak tepat sasaran. Contohnya, jika angka kematian akibat Covid-19 underreported, respons vaksinasi nasional bisa tertunda atau kurang efektif (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Sementara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Kabupaten Bangka dampak proses pembuatan akta kematian secara manual sangat memerlukan waktu lama untuk verifikasi

dan pencetakan akta kematian. Ketersediaan modal transportasi dan komunikasi terbatas, hal ini diperburuk oleh kurangnya petugas penjaga makam yang tidak dibiayai APBD. Sistem manual melibatkan biaya tinggi untuk administrasi fisik, transportasi dokumen, dan tenaga manusia, tanpa manfaat skala ekonomi dari digitalisasi. Di daerah terpencil, sistem manual sulit diakses oleh masyarakat miskin atau kurang terdidik, yang seringkali tidak memiliki waktu atau pengetahuan untuk mengurus akta.

Di Kabupaten Bangka, masalah spesifik adalah kesenjangan antara pelaporan kematian dan penerbitan akta, seperti terlihat dalam data berikut:

Tabel 1.1
Persentase capaian Akta Kematian yang diterbitkan secara manual oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka Tahun 2020–2025

Tahun	Pelaporan kematian	Akta kematian tercetak	Persentase
2020	14.859	11.849	79,74
2021	17.130	12.826	74,87
2022	21.011	21.011	100
2023	22.965	22.965	100
2024	25.300	25.300	100
2025	26.668	26.668	100

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka, 2025

Data tabel 1.1 ini menunjukkan hasil realisasi akta kematian yang tercetak secara manual pada tahun 2020-2021 belum tercetak 100 persen. Artinya masih ada kesenjangan antara kematian yang dilaporkan dengan tercatatnya akta

kematian di wilayah Kabupaten Bangka. Pada tahun 2022-2025 telah mengalami perubahan akta kematian yang tercetak telah mencapai 100 persen.

Berdasarkan teori, pendapat, argumentasi para ahli dan informasi berupa data capaian penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Bangka, maka penulis merasa perlu menggali informasi terkait dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan inovasi sistem informasi pelaporan kematian online pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka. Kemudian bagaimana dampak inovasi sistem informasi pelaporan kematian online tersebut terhadap peningkatan penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Bangka.

B. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang berjudul Inovasi pelayanan publik penerbitan akta kematian berbasis sistem informasi pelaporan kematian online di Kabupaten Bangka berada di wilayah Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode penelitian menggunakan model kombinasi Concurrent Embedded Strategy adalah metode penelitian campuran tidak seimbang antara metode kualitatif sebagai metode utama atau primer dan kuantitatif sebagai metode sekunder atau pelengkap (Morse dalam Sudaryono, 2019).

Pendekatan kualitatif dianalisis menggunakan model indikator inovasi menurut Rogers (Desi Tri Wulandari, 2021), terdiri dari: Keuntungan Relatif (Relative Advantage), Kesesuaian (Compatibility), Kerumitan (Complexity), Kemungkinan dicoba (Triability), Kemudahan Diamati (Observability). Untuk faktor yang merupakan hambatan

dalam Pelayanan Akta Kematian melalui SI POKEMON, penulis menggunakan model Borins dan Drucker terdiri dari faktor hambatan internal dan eksternal (Desi Tri Wulandari, 2021). Pendekatan kuantitatif menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan memberikan penjelasan terhadap data sekunder yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka.

Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober hingga Desember 2025. Informasi dan data yang dibutuhkan untuk menulis makalah ilmiah ini berasal dari sumber sekunder, termasuk Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dan instansi atau lembaga terkait lainnya, serta dokumentasi yang diperoleh dengan mengutip dari web, studi literatur, dan meninjau berbagai jurnal sebagai bahan referensi. Wawancara dan observasi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data primer, dan strategi pengambilan sampel bertujuan untuk mengidentifikasi informan yang kompeten dan memiliki akses ke subjek yang diteliti. Sementara itu, informan yang menangani sertifikat kematian menggunakan aplikasi SI POKEMON diidentifikasi menggunakan teknik pengambilan sampel insidental. Metode analisis data dari Miles dan Huberman dirujuk dalam uji validitas, yang menggunakan metodologi triangulasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Akta Kematian melalui SI POKEMON.

Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Pelaporan Kematian Daring, tertanggal 11 Desember 2023, menjadi dasar pelaksanaan layanan

inovatif pengurusan akta kematian di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Kematian Daring (SI POKEMON). Inovasi SI POKEMON yang dirancang oleh admin data base Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka yang pendaftarannya melalui kantor Desa/Kelurahan yang ada wilayah Kabupaten Bangka.

Karena prosesnya dapat diselesaikan di desa atau kecamatan tempat kematian terjadi, layanan sertifikat kematian inovatif dari aplikasi SI POKEMON dimaksudkan untuk mempermudah proses bagi masyarakat umum. Selain itu, solusi berbasis teknologi ini mempercepat prosedur dan memenuhi kebutuhan masa kini. Diharapkan dengan adanya pelayanan Akta Kematian melalui Aplikasi SI POKEMON minat masyarakat untuk melakukan pengurusan Akta Kematian, sehingga terhindar dari praktek percaloan.

Proses pengurusan Akta Kematian, melalui Aplikasi SI POKEMON sangat mudah, simpel tidak berbelit-belit, akan di jelaskan sebagai berikut:

- a. Masyarakat atau yang mewakili keluarga yang meninggal, sebagai pemohon menyerahkan berkas kelengkapan seperti: Kartu keluarga alm, ktp alm, surat keterangan meninggal dari dokter atau dari Desa/ Kelurahan dan ktp dua orang sebagai saksi.
- b. Setiap operator wajib menginput berkasnya melalui link ini <http://bit.ly/pokemonbangka>.
- c. Berkas yang sudah lengkap lalu di upload oleh operator dari desa.
- d. Data yang telah diajukan oleh operator desa langsung di terima oleh operator dukcapil.

- e. Kemudian staf admin operator melakukan penarikan berkas atau mendownload berkas yang telah diajukan di aplikasi tersebut guna diserahkan ke operator SIAK.
- f. Berkas tersebut langsung di proses input oleh operator SIAK pada hari itu juga.
- g. Bagian verifikator dukcapil langsung menyetujui pengajuan berkas untuk di terbitkan akta kematian tersebut.
- h. Kepala dinas dukcapil memverifikasi untuk membubuhkan tandatangan elektronik pada setiap berkas yang telah disetujui oleh pihak verifikator.
- i. Sehingga terbitlah akta kematian dan kartu keluarga dari warga yang telah meninggal dunia.
- j. Setiap berkas yang telah dibubuhkan tandatangan elektronik oleh Kepala dinas Dukcapil langsung terkirim ke email berupa pdf kepada operator desa dan kelurahan.
- k. Langkah berikutnya operator desa dan kelurahan langsung mendownload dan mencetak di kantornya masing-masing pada hari itu juga.
- l. Dapat diberikan akta tersebut kepada warga yang telah mengajukan berkas akta kematian tersebut.
- m. Untuk laporan Setap Akhir bulan operator dukcapil merekap data keseluruhan berkas yang telah diajukan untuk dijadikan laporan ke DP3SKB ke tingkat provinsi yang akan diteruskan ke tingkat pusat DIRJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI.

2. Analisis Inovasi Pelayanan Akta Kematian melalui SI POKEMON

Inovasi Pelayanan Akta Kematian melalui SI POKEMON akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif, menggunakan model lima indikator inovasi dari Rogers (Desi Tri Wulandari, 2021), berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Budianti ketua tim inovasi SI POKEMON sebagai berikut:

1. Keuntungan Relatif (Relative Advantage); didefinisikan sebagai tingkat profitabilitas suatu inovasi, yang dapat dievaluasi berdasarkan nilai ekonominya, kecepatan, dan kemudahan penggunaannya, atau karena mengandung elemen-elemen penting. Untuk menentukan bagaimana inovasi tersebut memengaruhi penerimanya, keunggulan relatif ini digunakan. Dilihat dari sisi nilai ekonomi SI POKEMON, baik sepanjang proses penciptaan, pengembangan, maupun pelaksanaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tidak mengeluarkan anggaran khusus. Inovasi SI POKEMON tidak berdampak khusus secara ekonomi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, namun yang mendapatkan keuntungan atau manfaat ekonomi adalah masyarakat yang terkena musibah dari kematian anggota keluarga. Selain itu dapat menghindarkan masyarakat dari praktek jasa calo, dan bisa menghemat biaya jika terjadi kekurangan berkas atau kesalahan penulisan dalam arti tidak perlu bolak balik untuk melengkapi persyaratan yang kurang.

Dilihat dari kecepatan bekerja, inovasi SI POKEMON ini dapat mempermudah pelayanan Akta Kematian. Berkas-berkas yang diperlukan dapat diajukan secara mandiri dari rumah oleh siapa pun yang ingin mengurus akta kematian ke Kantor Desa/Kelurahan. Selanjutnya dari pihak operator Desa/Kelurahan langsung proses input data dan kirim lewat SI POKEMON ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka. selanjutnya diverifikasi oleh kepala seksi, secara otomatis langsung masuk ke email Desa/kelurahan. Berdasarkan Prosedur Operasi Standar (SOP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, batas waktu pelayanan adalah satu hari kerja, asalkan koneksi internet stabil dan dokumen akurat serta lengkap. Pemrosesan akta kematian dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan jika Inovasi Aplikasi SI POKEMON diimplementasikan.

Baik untuk petugas maupun masyarakat umum, layanan Sertifikat Kematian inovatif dari SI POKEMON sangat mudah digunakan. Bagi petugas merasa lega, dikarenakan jumlah masyarakat yang melakukan pengurusan akta kematian jumlahnya berkurang cukup signifikan. Bagi masyarakat jika ada kekurangan ataupun kesalahan dapat menghemat biaya dan waktu, karena bisa langsung diperbaiki atau dilengkapi dari rumah.

2. Kesesuaian (Compatibility); adalah kebutuhan penerima inovasi layanan dan pengalaman sebelumnya dapat digunakan untuk menilai tingkat penerapan inovasi. Sebuah inovasi harus memiliki kesamaan dengan inovasi sebelumnya. Tujuannya adalah agar inovasi sebelumnya mendukung inovasi terbaru dan bertindak sebagai langkah menuju inovasi yang lebih baik. (Rogers dalam Desi Tri Wulandari, 2021). Inovasi layanan Akta Kematian dari SI POKEMON melengkapi penawaran tatap muka dan melalui website. Kesesuaian tersebut terdapat pada berkas persyaratan, output pelayanannya berupa akta kematian, sedangkan perbedaannya ada pada jenis media yang digunakan apakah secara offline, melalui laman website(www.pesonadukcapil.bangkago.id) atau menggunakan SI POKEMON. Kesesuaian berikutnya adalah dengan nilai dan norma yang berlaku, seperti; Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring dan Peraturan Bupati Bangka nomor 74 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Kabupaten Bangka (hasil wawancara dengan Sri Budiyaniti).
3. Kerumitan (Complexity); Inovasi selalu menghadirkan gaya baru dan tidak diragukan lagi memiliki dampak yang lebih besar, meskipun terkadang lebih canggih dari pada pendahulunya. Oleh karena itu, kompleksitas suatu inovasi bukanlah masalah besar. (Rogers dalam Desi Tri Wulandari, 2021). Inovasi pelayanan Akta Kematian melalui SI POKEMON memiliki kerumitan yaitu pada tingkat ketelitian dalam penulisan pertanyaan dalam formulir pendaftaran. Disamping itu masalah jaringan internet yang kurang stabil, sehingga akan menimbulkan keterlambatan dalam pencetakan Akta Kematian. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus mengedukasi masyarakat tentang metode layanan Akta Kematian untuk mengatasi hal ini melalui aplikasi SI POKEMON hingga sampai ke tingkat Desa/Kelurahan.
4. Kemungkinan dicoba (Triability); Suatu inovasi layanan harus terlebih dahulu menjalani pengujian publik agar semua orang dapat mengevaluasi kualitas produk inovasi tersebut. Untuk mengevaluasi kualitasnya, inovasi layanan aplikasi SI POKEMON menjalani fase pengujian. Untuk mendapatkan masukan publik, layanan sertifikat kematian diperkenalkan selama fase pengujian. Sehingga kesalahan dan kekurangan akan terdeteksi sedini mungkin. Jika produk inovasi telah diuji dan terbukti lebih berharga daripada pendahulunya, maka inovasi tersebut akan diterima. (Rogers dalam Desi Tri Wulandari, 2021).
5. Kemudahan Diamati (Observability); kita harus bisa mengamati bagaimana sebuah inovasi berfungsi dan apakah produk akhirnya lebih baik atau lebih

bermanfaat. (Rogers dalam Desi Tri Wulandari, 2021). Dari hasil wawancara dengan Sri Budianti, ternyata Inovasi pelayanan Akta Kematian melalui SI POKEMON cara kerja dan produk hasilnya dapat diamati secara langsung oleh masyarakat maupun pihak yang berkepentingan.

Hasil keseluruhan dari penerapan inovasi layanan aplikasi, SI POKEMON telah memberikan dampak positif bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka maupun untuk masyarakat. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari peningkatan permohonan pencetakan Akta Kematian sejak tahun 2022 hingga tahun 2025. Dari hasil observasi penulis masyarakat yang melakukan permohonan akta kematian secara tatap muka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka semakin berkurang.

3. Faktor – faktor yang menjadi hambatan pelayanan akta kematian melalui SI POKEMON

Pelayanan akta kematian melalui SI POKEMON, tidak semulus yang dibayangkan, namun ada beberapa hambatan baik hambatan secara internal maupun eksternal. Menurut Borins dan Drucker dalam Desi Tri Wulandari (2021), hambatan faktor internal terdiri dari adanya sikap khawatir yang berlebihan dan tidak mau berubah dalam penerapan inovasi, ketergantungan pada anggaran dan misi pelayanan yang keliru. Hambatan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari masyarakat sebagai pengguna layanan publik (Desi Tri Wulandari, 2021).

Fakta dilapangan faktor hambatan internal menurut teori Borins dan Drucker tersebut tidak terjadi pada pihak pelaksana inovasi SI POKEMON, hambatan internal yang terjadi adalah berupa jaringan internet, sehingga terkadang aplikasi tidak bisa di buka. Sedangkan hambatan eksternal adalah email dari operator Desa/ Kelurahan terkadang salah dalam penulisan. Data yang dikirim terkadang tidak masuk, disebabkan inbox email mereka telah penuh dan tidak di hapus terlebih dahulu (hasil wawancara dengan Eka Maulida sebagai admin SI POKEMON).

Tantangan infrastruktur seperti ketidakstabilan jaringan internet di daerah pesisir menyebabkan penundaan proses pencetakan akta, temuan ini sejalan dengan studi Ayuningtias (2025), yang menekankan bahwa kombinasi media digital dan konvensional memperkuat efek persuasif, sehingga masyarakat tidak hanya sadar akan pentingnya akta kematian untuk hak waris dan santunan, tetapi juga aktif melaporkan kematian secara real-time. Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa SI POKEMON sebagai inovasi e-Government berhasil mengubah perilaku masyarakat dari pasif menjadi proaktif.

4. Dampak Inovasi SI POKEMON terhadap peningkatan penerbitan Akta Kematian

Bagaimana dampak Inovasi SI POKEMON terhadap peningkatan penerbitan Akta Kematian akan di analisis dengan pendekatan kuantitatif deskriptif melalui tabel persentase capaian akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka tahun 2020–2025, berikut ini:

Tabel 1.2
Persentase Capaian Akta Kematian yang Diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka Tahun 2020–2025

Tahun	Pelaporan kematian	Akta kematian tercetak	Persentase
2020	14.859	11.849	79,74
2021	17.130	12.826	74,87
2022	21.011	21.011	100
2023	22.965	22.965	100
2024	25.300	25.300	100
2025	26.668	26.668	100

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka, 2025

Data pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa ada peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kematian. Begitu juga pada pihak Dinas Dukcapil ada keberhasilan kinerja, dilihat dari persentase akta kematian yang tercetak. Pernyataan ini dibuktikan dengan adanya peningkatan kematian yang dilaporkan dari 14.859 peristiwa pada tahun 2020 menjadi 26.668 peristiwa pada tahun 2025, begitu juga dengan adanya SI POKEMON telah berhasil meningkatkan realisasi penerbitan akta kematian dari 79,74% (tahun 2020) menjadi 100% (tahun 2022–2025). Hasil penelitian ini selaras dengan studi [Ayuningtias \(2025\)](#), yang menemukan bahwa inovasi digital seperti SI POKEMON efektif mengatasi underreporting di daerah pedesaan, dengan peningkatan persentase hingga mencapai 100%.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inovasi Pelayanan Akta Kematian

melalui SI POKEMON di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka telah menunjukkan keberhasilannya. Indikator keberhasilannya adalah masyarakat merasa

puas, karena mereka mendapat keuntungan relatif berupa hemat biaya dan waktu pengurusan akta kematian. Pihak pelaksanapun merasa puas karena bisa melayani masyarakat dengan cepat dan aman. Persyaratan maupun output inovasi SI POKEMON sesuai dengan pelayanan sebelumnya, sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat maupun dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Kerumitan yang terjadi di masyarakat tidak begitu signifikan, dari hasil uji coba yang dilakukan di tingkat Desa/ Kelurahan. Cara kerja dan produk hasil dari SI POKEMON bisa diamati oleh masyarakat maupun pihak yang berkepentingan, masyarakat maupun pihak pelaksana merasa sangat bermanfaat karena hasil penerbitan akta kelahiran bisa lebih cepat dari sebelumnya.

Hambatan secara keseluruhan juga tidak begitu signifikan, diantaranya adalah masalah jaringan internet yang terkadang dapat memperlambat proses pencetakan akta kematian dan adanya kesalahan dalam penulisan alamat email dan keterlambatan pihak operator menghapus data masuk dalam inbook email. Dampak dari pelaksanaan SI POKEMON adalah terjadi peningkatan jumlah Akta Kematian yang diterbitkan sangat signifikan bila dilihat perkembangannya selama 6 tahun terakhir. Semangat masyarakat untuk melaporkan peristiwa kematian juga semakin meningkat berbeda dengan kejadian sebelum adanya inovasi SI POKEMON.

Rekomendasi penulis terhadap kemajuan SI POKEMON adalah perlu adanya stabilitas jaringan dan peralatan komputer/laptop di Desa/Kelurahan dan petugas pendampingan yang standby membantu masyarakat yang kesulitan khususnya para orang tua yang kurang mampu.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ayuningtias, Putri Indana, (2025). Strategi Komunikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dalam Meningkatkan Kesadaran Publik mengenai Administrasi Kependudukan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(3), Juni 2025.
- Ahmadi, R. (2024). Inovasi Pelayanan Publik. Purbalingga: Eureka Media Aksara
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Indonesia 2023. Jakarta: BPS
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2024). Laporan Tahunan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK). Jakarta: Kemendagri
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka. (2025). Laporan Kinerja Dukcapil Bangka Tahun 2024. Sungailiat: Pemerintah Kabupaten Bangka.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2023. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Prasodjo, T. (2023). Pelayanan Publik Era digital. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi
- Sadar. (2023). E.government: Konsep; Implementasi dan evaluasi e-government di Indonesia. Bandung: Widina Media Utama.
- Sudaryono. (2019). Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- United Nations, (2021). Laporan tentang e-government development index.
- World Health Organization (2022). Standar Otopsi Verbal. (<https://www.who.int.translate.goog>)
- Wulandari, D.T, Parwiyanto, H. (2021) Inovasi Pelayanan Akta Kematian Online melalui Aplikasi Adminduk Online Makin Oke (AKOne MAK'e) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(2), 2021 Halaman 219-233,